



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Telp. 0264-8224794 Purwakarta 41115

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (BNRI Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2208 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

16. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

#### **Pasal 2**

Renja DPMPTSP Tahun 2022 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berpedoman pada RKPD 2022.

#### **Pasal 3**

Renja DPMPTSP Tahun 2022 disusun dengan sistematika uraian sebagai berikut :

- a. Pendahuluan
- b. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu
- c. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- d. Penutup

Uraian Renja DPMPTSP Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 4

Renja DPMPTSP Tahun 2022 berfungsi sebagai :

1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022;
3. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Tanggal : Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWAKARTA



R. MUCHAMMAD MURCAHIA S.T.M.M.

NIP.19731102 199901 1 001